

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat diterbitkannya UU No.17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara sebagai awal mula reformasi keuangan negara di Indonesia. Dimana pada saat sebelum terlaksananya reformasi di bidang keuangan negara prinsip akuntansi pemerintah dilaksanakan dengan berbasis pada kas, dimana pada saat itu penerapan akuntansi berbasis kas dinilai kurang efektif dalam pengelolaan keuangan negara karena dirasa belum dapat menjelaskan dan memberikan gambaran secara tepat atas posisi laporan keuangan negara. Maka, dibentuknya UU No.17 Tahun 2003 sebagai salah satu wujud reformasi yang dilakukan pemerintah dengan pergantian sistem dari kebijakan akuntansi yang berbasis kas menjadi sistem kebijakan akuntansi yang berbasis akrual. Adapun pergantian sistem yang diawali dari metode berbasis kas ke metode berbasis akrual dikarenakan pada metode berbasis akrual dapat lebih efektif dalam memberikan gambaran secara jelas dan lebih lengkap terkait informasi atas pelaporan keuangan pemerintah.

Sehingga, atas dasar itu pemerintah Indonesia membuat suatu peraturan yang merupakan dasar baru dalam pelaksanaan pelaporan keuangan yang dilaksanakan oleh tiap instansi pemerintah pusat dengan menjadikan peraturan tersebut sebagai

pedoman dalam pelaksanaan penyusunan dan pelaporan laporan keuangan pemerintah pusat. Adapun peraturan itu adalah PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP, dimana lebih dirincikan didalamnya pada pasal 4 ayat 1 tentang PSAP yang berbasis akrual. Adapun terdapatnya beberapa prinsip pada SAP, dimana sudah dilaksanakan pada proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang dilaksanakan hingga saat ini.

Berdasarkan pada PP No.71 Tahun 2010, adapun termuat didalamnya membahas tentang kerangka konseptual SAP. Kerangka konseptual SAP yang merupakan pedoman dasar untuk satuan kerja pemerintah pusat sebelum melaksanakan proses penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tersebut. Dalam hal proses penyusunan kebijakan akuntansi terdiri atas 2 hal antara lain kebijakan akuntansi tentang penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tentang rincian akun atas jenis barang yang dijelaskan pada PSAP 05.

Pada PSAP 05 ini juga memiliki fungsi untuk dapat mengelola perlakuan atas barang persediaan ataupun informasi terkait untuk selanjutnya dilakukan penyajian pada laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan PSAP 05 menyatakan persediaan sebagai bagian dari aset lancar yang dapat berupa barang ataupun perlengkapan dengan berfungsi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasional instansi pemerintah, suatu bahan ataupun perlengkapan dimana dapat dimanfaatkan untuk mendukung sebuah kegiatan produksi, ataupun dapat berbentuk sebuah barang yang disimpan dimana selanjutnya dapat dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang sedang dalam kegiatan produksi dimana akan selanjutnya dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dengan bentuk jadi

atau hasil akhir. Berdasarkan PSAP 05 itu didalamnya mempunyai sebuah standar yang difungsikan untuk dapat mengelola perlakuan atas akuntansi persediaan yaitu pengakuan persediaan, pengukuran persediaan, pengungkapan persediaan, dan pelaporan persediaan.

Dalam hal ini DJBC menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara di bidang kepabeanan dan cukai. DJBC dengan berdasarkan pada PMK No.183/PMK.01/2020 memiliki sebuah unit instansi vertikal yang bertanggung jawab atas tugas dan fungsinya tentang pelaksanaan penerimaan negara dalam lingkup kepabeanan dan cukai. Salah satunya yaitu KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, dalam hal ini adalah suatu unit vertikal dari DJBC yang salah satu tugasnya melaksanakan kebijakan terkait dengan akuntansi persediaan pada satuan kerjanya, dimana lebih spesifik bagian yang melaksanakan kebijakan tersebut adalah UAKPA dan UAKPB.

Satuan kerja yang disebutkan mempunyai tugas untuk bertanggung jawab dalam penerapan akuntansi persediaan yang meliputi proses pengakuan persediaan, pengukuran persediaan, pencatatan persediaan, pengungkapan dan penyajian persediaan pada unit vertikal DJBC diatas. Adanya penerapan akuntansi persediaan yang dilaksanakan pada kantor diatas dikarenakan persediaan adalah sebuah hal penting dalam suatu satuan kerja, karena tanpa adanya persediaan kantor diatas tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal sehingga diperlukannya suatu penerapan standar akuntansi yang dapat mengatur perlakuan atas persediaan agar persediaan yang ada dapat digunakan dan difungsikan dengan

maksimal untuk mendukung tugas dan fungsi dari unit vertikal DJBC yang disebutkan diatas.

Dengan berdasarkan pada penjelasan tersebut, saya sebagai penulis tertarik untuk melakukan pembahasan terkait proses penerapan akuntansi persediaan pada KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dengan cara meninjau kesesuaiannya terhadap SAP dan PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan. Oleh karena itu, pada KTTA ini penulis mengangkat judul terkait “Tinjauan atas Penerapan Akuntansi Persediaan pada KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan diatas, terdapat beberapa permasalahan yang muncul dan akan diteliti pada KTTA ini yaitu sebagai berikut :

- a. Apakah pada KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sudah menerapkan akuntansi persediaan yang sesuai berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 dan PSAP 05?
- b. Dalam prosesnya kendala apa yang dialami oleh KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok pada saat proses penerapan akuntansi persediaan yang dilaksanakannya, beserta cara satuan kerja tersebut untuk mengatasi kendala-kendala yang dialami dalam penerapan akuntansi persediaan ?
- c. Apakah terdapat hal-hal yang digunakan oleh KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok agar pencapaian penerapan akuntansi persediaan yang baik dan sesuai ?

1.3 Tujuan Penulisan

Dalam hal ini terdapat tujuan penulisan dari KTTA ini yaitu sebagai berikut :

- a. Melakukan tinjauan pada KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tentang kesesuaian penerapan akuntansi persediaan yang telah dilaksanakan dengan PP No.71 Tahun 2010 dan PSAP 05
- b. Dapat mengetahui proses penerapan akuntansi persediaan secara langsung dengan cara melakukan pemantauan atas proses penerapan akuntansi persediaan pada KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok
- c. Mengetahui seluruh kendala-kendala yang dialami dalam proses penerapan akuntansi persediaan terutama pada KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam KTTA ini memiliki fokus utama untuk membahas tentang kesesuaian penerapan akuntansi persediaan pada KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dengan teori dan proses penerapan akuntansi persediaan yang berdasarkan pada PSAP 05. Pada PSAP 05 terdiri atas pengertian persediaan, pengklasifikasian persediaan, pengakuan persediaan, pengukuran persediaan, pencatatan persediaan, penyajian dan pengungkapan persediaan.

1.5 Manfaat Penulisan

Berdasarkan atas penjelasan diatas terdapat manfaat yang diharapkan dari penulisan KTTA ini yaitu antara lain :

a. Bagi Penulis

Dengan KTTA ini bagi penulis sebagai bentuk dari hasil yang didapat selama masa studi penulis di bidang Akuntansi Pemerintah Pusat dalam hal proses penerapan akuntansi persediaan yang dilakukan oleh satuan kerja pemerintah.

b. Bagi Akademik

Dengan KTTA ini penulis berharap bisa bermanfaat bagi Politeknik Keuangan Negara STAN untuk menjadi referensi atau acuan bagi penelitian setelah ini pada lingkup dan jenis permasalahan yang terkait dengan KTTA ini.

c. Bagi Satuan Kerja

Dengan KTTA ini diharapkan berguna untuk bahan evaluasi atau review bagi satuan kerja dalam hal proses penerapan akuntansi persediaan yang ada di satuan kerja tersebut dapat sebagai salah satu cara mengatasi kendala-kendala yang masih terjadi , serta untuk mengetahui apakah proses yang diterapkan sudah sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010 dan PSAP 05.

d. Bagi Pembaca

Hasil dari KTTA ini nantinya diharapkan menjadi ilmu pengetahuan dan informasi yang bermanfaat bagi para pembacanya terkait dengan proses penerapan akuntansi persediaan yang dilakukan pada salah satu satuan kerja pemerintah.

1.6 Sistematika Penulisan

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS TUGAS AKHIR

HALAMAN PERNYATAAN LULUS DARI TIM PENILAI KARYA TULIS TUGAS AKHIR

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS TUGAS AKHIR

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Tujuan Penulisan
- 1.4 Ruang Lingkup Penulisan
- 1.5 Manfaat Penulisan
- 1.6 Sistematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

- 2.1 Pengertian dan Klasifikasi Persediaan
- 2.2 Pengakuan Persediaan
- 2.3 Pengukuran Persediaan
- 2.4 Pencatatan Persediaan
- 2.5 Penyajian dan Pengungkapan Persediaan

BAB III METODEDE DAN PEMBAHASAN

- 3.1 Metode Pengumpulan Data
- 3.2 Gambaran Umum KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok
 - 3.2.1 Profil KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok
 - 3.2.1.1 Visi, Misi, dan Tujuan KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok
 - 3.2.1.2 Tugas dan Fungsi KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok
 - 3.2.1.3 Struktur Organisasi KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok
 - 3.2.2 Kebijakan Akuntansi pada KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok
- 3.3 Pembahasan
 - 3.3.1 Tinjauan atas Pengertian dan Klasifikasi Persediaan
 - 3.3.2 Tinjauan atas Pengakuan Persediaan
 - 3.3.3 Tinjauan atas Pengukuran Persediaan
 - 3.3.4 Tinjauan atas Pencatatan Persediaan
 - 3.3.5 Tinjauan atas Penyajian dan Pengungkapan Persediaan
 - 3.3.6 Kendala dalam Penerapan Akuntansi Persediaan pada KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

SURAT RISET

DAFTAR RIWAYAT HIDUP